

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aay Muh. Furkon, Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher. 2012. *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat : Rekomendasi Terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: The Habibie Center.
- Ahmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin Asikin dan Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Firmansyah Arifin, dkk. 2005. *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*. Jakarta: Bekerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI).
- Galang Taufani Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Gunawan A.Tauda. 2012. *Komisi Negara Independen : Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Jazim Hamidi Lutfi dan Mustafa. 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Malang: Alumni.
- Jimly Ashiddiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Max Bobby. 1994. *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muhadam Labolo Ilham dan Teguh. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nurainun Magunsong. 2010. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press.

Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sri Soemantri. 1993. *Ketatanegaraan Indonesi Dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Syamsuddin Haris. 1997. *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PPW-LIPI.Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.

Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

## **C. Jurnal**

Ady Supryadi. 2024. "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu." *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 18, No. 1.

Bakri Iskandar. 2019. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *EX Renaissance*, Vol. 4, No. 2.

- Daniel Panggabean. 2022. "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah ." *Nommesen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Vol.3.
- Darul Huda Mustaqim. 2019. "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen." *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1.
- Ismail Aris. 2019. "Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 4.
- Muhammad Habibi. 2020. "Independensi Kewenanga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Cepalo Jurnal*, Vol. 4, No. 1.
- May Lim Charity. 2017. "Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3.
- Subardjo. 2016. "Penggunaan Hak Angket Oleh DPR RI Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah." *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 1.
- Sunarto. 2018. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan Antara Orde Baru dan Era Reformasi)." *Integralistik*, No. 1.
- Wawan Heru Suyatmiko Nicola dan Alvin. 2019. "Menakar Lembaga Antikorupsi : Studi Peinjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No. 2 .
- Witianti, Ratnia Solihah dan Siti. 2016. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014 : Permasalahan dan Upaya Mengatasinya." *COSMOGOV*, Vol.2, No.2.

#### **D. Skripsi**

- Al-Fatih. 2015. "Reformulasi Parliamentary Threshold yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif di Indonesia." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Safitri, Elia Roza. 2022. "Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan DPR Terhadap KPK (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.36/PUU XV/2017)." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

## E. Makalah

Asshiddiqie, Jimly. 1994. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945." Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM.

## F. Internet

Andalas, Fakultas Hukum Universitas. *Kontroversi Hak Angket Dalam Memerangi Kecurangan Pemilu 2024*. Diakses pada 27 Mei 2024. [https://fhuk.unand.ac.id/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=4013:kontroversi-hak-angket-dalam-memerangi-kecurangan-pemilu-2024&Itemid=1537&lang=id](https://fhuk.unand.ac.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=4013:kontroversi-hak-angket-dalam-memerangi-kecurangan-pemilu-2024&Itemid=1537&lang=id).

DPR. *Fraksi DPR*. Diakses pada 16 Mei 2024. <https://www.dpr.go.id/tentang/fraksi>.

Isra, Saldi. *Konstitusi, Konstitusionalisme, dan Demokrasi Konstitusional*. Diakses pada 16 Mei 2024. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/622-konstitusi-konstitusionalisme-dan-demokrasi-konstitusional.html>.

Kompasmedia. *Hak Angket DPR: Era Soekarno Hingga Jokowi*. <https://kompasmedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/hak-angket-dpr-era-soekarno-hingga-jokowi>.

News, Detik. *5 Argumen Ahli Tata Negara Unpad Nilai Hak Angket Pilpres Tak Relevan*. <https://news.detik.com/berita/d-7206631/5-argumen-ahli-tata-negara-unpad-nilai-hak-angket-pilpres-tak-relevan>

RI, DPR. *Guspardi Gaus : Hak Angket Untuk Kecurangan Pemilu Tidak Tepat..* <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48587/t/Guspardi%20Gaus:%20Hak%20Angket%20untuk%20Kecurangan%20Pemilu%20Tidak%20Tepat>.

RI, Sekretariat Jendral DPR. *Hak DPR*. <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>.

—. *Tugas dan Wewenang DPR*. <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenangdpr>.